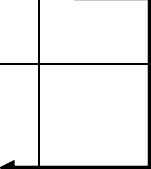
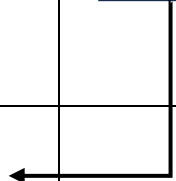


 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BPSPDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau	NOMOR SOP	W.32.SDM.7.OT.02.02-23
	TANGGAL PEMBUATAN	24 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	18 Juni 2024
	TANGGAL EFEKTIF	18 Juni 2024
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU  Ditandatangani secara elektronik oleh : Aditya Sarsito Sukarsono NIP 197509181999031001
	NAMA SOP	PENYUSUNAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1.Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3.Permenkumham Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM.	1. Memahami tugas pokok dan fungsi pendidikan dan pelatihan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
-	Komputer/Printer, Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dapat berakibat kegiatan tahunan tidak akan berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai arsip	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KERJASAMA ANTAR INSTANSI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		KABADIKLAT	KASI PROGEVAL	JF/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM memerintahkan Kepala Seksi Program dan Evaluasi untuk membuat Mou pelaksanaan pelatihan dengan instansi eksternal maupun internal.				Disposisi	10 Menit	Disposisi
2	Kepala Seksi Program dan Evaluasi menyiapkan Kerangka MoU pelaksanaan pelatihan				Menyusun kerangka perjanjian Kerjasama mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan Kepala BPSDM Hukum dan HAM	3 jam	Kerangka awal perjanjian Kerjasama dengan eksternal maupun internal
3	Membuat susunan dasar perjanjian kerjasama pelaksanaan pelatihan sesuai dengan pedoman yang telah di tetapkan Kepala BPSDM Hukum dan HAM				Dasar perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan pelatihan dengan pihak eksternal maupun internal	2 Jam	Dokumen perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak
4	Melaporkan hasil dokumen perjanjian Kerjasama kepada Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau				Dokumen perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua bela	1 jam	Dokumen perjanjian Kerjasama yang telah disepakati keduabelah pihak
							

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		KABADIKLAT	KASI PROGEVAL	JF/ PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
							
5	Membuat jadwal pelaksanaan penandatanganan Kerjasama dengan pihak eksternal atau internal				Dokumen perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak	1 jam	Dokumen perjanjian Kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak
6	Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau melaksanakan penandatanganan Bersama pihak terkait				Dokumen perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani dan di sepakati kedua belah pihak	1 Jam	Dokumen perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani dan di sepakati kedua belah pihak
8	Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM menyampaikan hasil perjanjian kerjasama kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM				Dokumen perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani dan di sepakati kedua belah pihak	30 Menit	Dokumen perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani dan di sepakati kedua belah pihak